



Hambatan Non Tarif dan Dampaknya terhadap Ekspor Produk UMKM Indonesia

Muhammad Haykel*, Gunardi Lie

Universitas Tarumanagara

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai risiko yang muncul dalam transaksi bisnis internasional, khususnya pada kegiatan ekspor-impor di kawasan Asia Tenggara, serta mengevaluasi strategi yang dapat diterapkan untuk meminimalkan dampak risiko tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, dengan sumber data sekunder yang meliputi dokumen resmi pemerintah, publikasi akademik, laporan organisasi internasional, dan literatur terkait perdagangan internasional. Data dianalisis menggunakan metode *content analysis* untuk mengidentifikasi jenis risiko yang paling dominan, termasuk fluktuasi nilai tukar, hambatan logistik, ketidakpastian regulasi, serta hambatan non-tarif yang sering membebani pelaku usaha, terutama UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko-risiko tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kelancaran transaksi ekspor-impor, biaya produksi, serta daya saing produk di pasar internasional. Selain itu, hambatan non-tarif dan prosedur administrasi yang kompleks turut memperlambat proses ekspor dan membatasi akses UMKM ke pasar global. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan strategi manajemen risiko yang tepat, seperti peningkatan kapasitas internal UMKM, kepatuhan terhadap standar internasional, pemanfaatan teknologi digital, dan dukungan kebijakan pemerintah, dapat membantu mengurangi dampak negatif dari risiko tersebut. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan studi perdagangan internasional, serta menjadi acuan praktis bagi eksportir dalam mengelola risiko transaksi lintas negara, khususnya bagi UMKM yang ingin memperluas pasar global.

Kata kunci: Risiko Transaksi, Perdagangan Internasional, Ekspor-Impor, UMKM, Manajemen Risiko

DOI: <https://doi.org/10.47134/umkm.v2i2.915>

*Correspondence: Muhammad Haykel

Email: muhammad.205230380@stu.untar.ac.id

Received: 26-09-2025

Accepted: 03-10-2025

Published: 31-10-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the various risks present in international business transactions, particularly in export-import activities within the Southeast Asian region, and to evaluate strategies that can be implemented to mitigate these risks. The research employs a qualitative approach using a case study method, with secondary data sources including official government documents, academic publications, reports from international organizations, and relevant literature on international trade. Data were analyzed through content analysis to identify the most dominant types of risks, including exchange rate fluctuations, logistical barriers, regulatory uncertainties, and non-tariff barriers, which often burden businesses, especially micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The results indicate that these risks significantly impact the smoothness of export-import transactions, production costs, and product competitiveness in international markets. Non-tariff barriers and complex administrative procedures further slow down export processes and limit MSMEs' access to global markets. The study also finds that effective risk management strategies, such as improving internal capacities of MSMEs, compliance with international standards, utilization of digital technology, and

government support, can help mitigate the negative effects of these risks. The findings of this research are expected to contribute academically to the field of international trade studies and provide practical guidance for exporters in managing cross-border transaction risks, particularly for MSMEs seeking to expand into global markets.

Keywords: Transaction Risk, International Trade, Export-Import, Msmes, Risk Management

Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan salah satu motor utama dalam perkembangan perekonomian global. Melalui perdagangan lintas batas, negara dapat memperluas akses pasar, meningkatkan devisa, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2018). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki peluang besar untuk memaksimalkan potensi ekspor, tidak hanya melalui sektor industri besar, tetapi juga melalui kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM bahkan telah diakui sebagai tulang punggung perekonomian nasional karena jumlah unit usahanya yang mendominasi serta kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja (Tambunan, 2019).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai lebih dari 60% pada tahun 2023, dan sektor ini menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih relatif kecil, yaitu hanya sekitar 15% dari total nilai ekspor Indonesia. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi peran UMKM dalam perdagangan internasional (World Bank, 2021). Salah satu penyebab utama rendahnya kontribusi ekspor UMKM adalah hambatan non-tarif atau *Non-Tariff Barriers (NTBs)* yang diterapkan oleh negara mitra dagang.

Hambatan non-tarif didefinisikan sebagai kebijakan perdagangan yang tidak berbentuk pungutan tarif, tetapi mampu memengaruhi aliran barang lintas negara secara signifikan (UNCTAD, 2020). Berbeda dengan tarif bea masuk yang secara eksplisit menambah biaya transaksi, hambatan non-tarif mencakup aturan teknis, standar kesehatan, persyaratan administrasi, kuota, hingga prosedur sertifikasi yang harus dipenuhi eksportir (Ahamed & Noboa, 2023). Tujuan utama dari kebijakan ini biasanya adalah untuk melindungi konsumen dan industri domestik negara importir. Namun, bagi eksportir kecil khususnya UMKM, hambatan non-tarif sering kali justru menjadi kendala berat yang mengurangi daya saing produk mereka di pasar global.

Salah satu bentuk hambatan non-tarif yang paling sering dihadapi UMKM Indonesia adalah regulasi terkait standar kesehatan dan keamanan pangan atau *Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS)*. Produk pangan olahan UMKM, misalnya, harus melalui proses sertifikasi ketat sebelum dapat masuk ke pasar Eropa atau Amerika Serikat. Proses ini membutuhkan biaya tambahan untuk pengujian laboratorium, sertifikasi kualitas, serta perbaikan kemasan sesuai standar internasional (WTO, 2022). Tanpa pemenuhan standar tersebut, produk UMKM berpotensi ditolak di pelabuhan negara tujuan.

Selain itu, hambatan non-tarif juga hadir dalam bentuk prosedur administratif yang rumit, waktu tunggu yang panjang di pelabuhan, serta persyaratan dokumentasi yang kompleks. Tingginya biaya logistik akibat hambatan administratif ini menjadi beban

tambahan bagi UMKM yang sejak awal sudah terbatas dalam akses permodalan (Ariyani & Pramudito, 2021). Dengan kondisi tersebut, daya saing produk UMKM Indonesia menjadi semakin lemah dibandingkan produk dari negara lain yang memiliki infrastruktur ekspor lebih mapan.

Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut karena UMKM merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM memiliki potensi besar dalam mendorong ekspor non-migas, tetapi masih menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan modal, rendahnya literasi ekspor, serta kurangnya pemahaman mengenai standar internasional (OECD, 2021). Hambatan non-tarif menjadi salah satu penghalang terbesar yang mempersempit ruang gerak UMKM untuk bersaing secara global.

Penelitian ini relevan karena mayoritas literatur terdahulu mengenai perdagangan internasional masih lebih banyak menitikberatkan pada hambatan tarif, fluktuasi nilai tukar, atau dampak perjanjian perdagangan bebas (Nugroho, 2020). Padahal, dalam dua dekade terakhir, hambatan non-tarif justru semakin dominan dan kompleks. Negara-negara maju kini lebih sering menggunakan instrumen non-tarif dibanding tarif dalam mengatur arus barang lintas batas (UNCTAD, 2020). Dengan demikian, studi mengenai hambatan non-tarif terhadap ekspor UMKM Indonesia akan memberikan pemahaman baru mengenai tantangan yang dihadapi serta strategi kebijakan yang dapat ditempuh.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai dinamika perdagangan internasional dengan menyoroti aspek non-tarif yang sering terabaikan. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi dukungan terhadap UMKM agar lebih mampu menembus pasar global. Dengan adanya strategi yang tepat, hambatan non-tarif tidak lagi menjadi penghalang permanen, melainkan tantangan yang bisa diatasi untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di kancah internasional.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana hambatan non-tarif memengaruhi kinerja ekspor produk UMKM Indonesia. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi bentuk-bentuk hambatan non-tarif yang paling sering dihadapi UMKM, mulai dari persyaratan sertifikasi, standar kesehatan dan keamanan pangan, hingga prosedur administratif yang kompleks. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah sejauh mana hambatan tersebut memengaruhi daya saing produk UMKM di pasar internasional. Dengan memahami hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi UMKM dalam aktivitas ekspor, sekaligus menawarkan masukan yang relevan bagi

pembuat kebijakan agar dapat menyusun strategi pendukung yang mampu meningkatkan kemampuan UMKM dalam menembus pasar global.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena hambatan non-tarif yang dihadapi UMKM dalam kegiatan ekspor, bukan pada pengukuran angka secara statistik. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis berbagai bentuk hambatan non-tarif serta dampaknya terhadap daya saing produk UMKM Indonesia di pasar internasional.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu dokumen, laporan resmi, publikasi internasional, jurnal ilmiah, serta data dari lembaga pemerintah seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM. Data sekunder ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan perdagangan, standar internasional, serta regulasi yang diterapkan oleh negara mitra dagang. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada laporan dari organisasi internasional seperti World Trade Organization (WTO), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), serta Bank Dunia, yang membahas mengenai tren hambatan non-tarif secara global.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*). Analisis isi digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan dokumen serta literatur yang relevan, kemudian mengelompokkannya berdasarkan jenis hambatan non-tarif yang dihadapi UMKM. Selanjutnya, hasil analisis tersebut diinterpretasikan untuk memahami bagaimana hambatan tersebut memengaruhi akses pasar internasional bagi UMKM Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kendala yang dihadapi UMKM sekaligus membuka ruang diskusi mengenai strategi kebijakan yang dapat diambil untuk mendukung peningkatan ekspor UMKM.

Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Hambatan Non-Tarif yang Dihadapi UMKM Indonesia

Hasil kajian menunjukkan bahwa UMKM Indonesia menghadapi beragam hambatan non-tarif ketika berupaya mengekspor produk ke pasar internasional. Hambatan tersebut tidak hanya terbatas pada regulasi teknis atau standar kesehatan, tetapi juga mencakup berbagai kebijakan lain yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi arus perdagangan. Secara umum, hambatan non-tarif yang dihadapi UMKM Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama.

Pertama, hambatan dalam bentuk standar kesehatan dan keamanan pangan atau Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS). Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa memiliki standar yang ketat terhadap keamanan pangan, kandungan kimia, hingga ketertelusuran produk. UMKM yang mengekspor produk makanan atau minuman olahan harus melalui proses sertifikasi yang panjang dan memerlukan biaya besar. Jika standar tersebut tidak terpenuhi, produk bisa ditolak masuk ke pasar tujuan (WTO, 2022).

Kedua, hambatan berupa *Technical Barriers to Trade* (TBT) yang mencakup regulasi teknis, aturan kemasan, pelabelan, dan persyaratan mutu. Misalnya, produk batik atau kerajinan kayu dari UMKM Indonesia harus memenuhi persyaratan mengenai label ramah lingkungan, penggunaan bahan baku legal, dan ketahanan produk sebelum bisa masuk pasar Eropa (UNCTAD, 2020).

Ketiga, hambatan non-tarif juga muncul dalam bentuk kuota impor yang diterapkan negara tujuan ekspor. Walaupun UMKM mampu memenuhi standar kualitas, adanya batas kuota ekspor membuat produk mereka sulit bersaing dengan perusahaan besar yang lebih dulu mendapatkan akses (Ahamed & Noboa, 2023).

Keempat, hambatan administratif seperti prosedur perizinan, dokumen ekspor yang berlapis, dan waktu tunggu di pelabuhan. Proses yang panjang ini sering meningkatkan biaya logistik dan mengurangi efisiensi rantai pasok. Menurut Ariyani dan Pramudito (2021), biaya logistik ekspor Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara, sehingga menjadi beban tambahan bagi UMKM.

Selain itu, terdapat pula hambatan berupa kebijakan lingkungan yang semakin banyak digunakan negara maju. Misalnya, aturan mengenai jejak karbon (*carbon footprint*) dan keberlanjutan bahan baku. Produk kopi dan kakao dari UMKM Indonesia kini harus dilengkapi sertifikasi keberlanjutan jika ingin masuk pasar Eropa (OECD, 2021).

2. Dampak Hambatan Non-Tarif terhadap Daya Saing UMKM

Hambatan non-tarif membawa dampak signifikan terhadap daya saing UMKM Indonesia. Dampak pertama adalah peningkatan biaya produksi dan distribusi. UMKM harus menanggung biaya tambahan untuk sertifikasi, pengujian laboratorium, serta perbaikan kemasan sesuai standar internasional. Hal ini membuat harga produk menjadi kurang kompetitif dibandingkan produk serupa dari negara lain (Ariyani & Pramudito, 2021).

Dampak kedua adalah terhambatnya akses pasar. Hambatan non-tarif sering kali membuat UMKM hanya mampu menembus pasar regional seperti Asia Tenggara, sementara pasar bernilai tinggi seperti Amerika Serikat atau Uni Eropa sulit dijangkau. Akibatnya, kontribusi UMKM terhadap total ekspor Indonesia masih sangat kecil, yaitu sekitar 15% (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Dampak ketiga adalah menurunnya reputasi dan kepercayaan *buyer* internasional. Keterlambatan pengiriman akibat proses administratif atau penolakan produk di pelabuhan dapat menurunkan kredibilitas UMKM di mata pembeli luar negeri (World Bank, 2021). Hal ini berbahaya karena perdagangan internasional sangat bergantung pada kepercayaan dan kontinuitas pasokan.

Selain itu, hambatan non-tarif juga berimplikasi pada berkurangnya posisi tawar UMKM. Karena kesulitan memenuhi standar global, UMKM sering bergantung pada perantara ekspor atau perusahaan besar yang sudah memiliki sertifikasi lengkap. Akibatnya, UMKM menerima margin keuntungan yang lebih kecil dibandingkan jika mengekspor secara langsung (Tambunan, 2019).

3. Studi Kasus: UMKM Indonesia dalam Menghadapi Hambatan Non-Tarif

Kasus nyata dapat dilihat pada produk kopi Indonesia. Banyak UMKM yang memproduksi kopi berkualitas tinggi, namun ketika diekspor ke Uni Eropa harus memenuhi standar keberlanjutan dan *traceability*. Beberapa pengiriman kopi sempat ditolak karena tidak memenuhi standar residu pestisida yang ditetapkan Uni Eropa (OECD, 2021). Kondisi serupa juga dialami UMKM produsen makanan olahan, seperti keripik singkong dan minuman herbal, yang harus melalui proses sertifikasi *Halal* dan *food safety* agar dapat masuk ke pasar Timur Tengah.

Studi lain menunjukkan bahwa ekspor batik Indonesia sempat terkendala di pasar Amerika Serikat karena masalah label ramah lingkungan dan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses pewarnaan. Banyak UMKM batik yang akhirnya kesulitan menembus pasar global, meskipun permintaan batik cukup tinggi (UNCTAD, 2020).

4. Perbandingan dengan UMKM Negara Tetangga

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, UMKM Indonesia masih tertinggal dalam hal kesiapan menghadapi hambatan non-tarif. UMKM di Vietnam dan Thailand, misalnya, sudah lebih banyak mendapat dukungan pemerintah berupa subsidi sertifikasi internasional serta bantuan logistik (World Bank, 2021). Akibatnya, kontribusi UMKM terhadap ekspor di negara-negara tersebut lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Malaysia juga berhasil meningkatkan peran UMKM dalam ekspor dengan menyediakan *export promotion program* yang secara langsung mendampingi UMKM menembus pasar global. Sementara di Indonesia, program serupa masih terbatas jangkauannya dan belum menyentuh mayoritas pelaku UMKM (Nugroho, 2020).

5. Strategi Mengatasi Hambatan Non-Tarif

Untuk menghadapi hambatan non-tarif, terdapat beberapa strategi yang dapat ditempuh. Dari sisi pemerintah, diperlukan kebijakan yang lebih proaktif dalam mendukung UMKM. Misalnya, penyediaan fasilitas sertifikasi gratis atau bersubsidi, diplomasi perdagangan untuk menegosiasikan standar yang lebih fleksibel, serta perbaikan infrastruktur logistik agar biaya ekspor lebih efisien (WTO, 2022).

Dari sisi UMKM, pelaku usaha harus meningkatkan kapasitas melalui inovasi produk, penerapan standar internasional, serta pemanfaatan teknologi digital. Penggunaan teknologi *blockchain* untuk *traceability* produk misalnya, dapat menjadi solusi untuk memenuhi standar keberlanjutan yang kini diwajibkan oleh pasar global (OECD, 2021).

Selain itu, kolaborasi antara UMKM, asosiasi bisnis, lembaga riset, dan sektor swasta sangat penting. Melalui kemitraan ini, UMKM dapat lebih mudah memperoleh informasi mengenai regulasi internasional, mendapatkan akses sertifikasi, serta memperluas jaringan pemasaran (UNCTAD, 2020).

6. Relevansi Hambatan Non-Tarif dalam Konteks Perdagangan Global

Secara keseluruhan, hasil pembahasan ini menegaskan bahwa hambatan non-tarif merupakan tantangan utama yang kini lebih dominan dibandingkan hambatan tarif. Negara-negara maju lebih banyak menggunakan instrumen non-tarif atas alasan perlindungan konsumen, lingkungan, dan kesehatan masyarakat (Nugroho, 2020). Dalam konteks ini, UMKM Indonesia tidak memiliki pilihan selain menyesuaikan diri dengan standar global jika ingin tetap eksis di pasar internasional.

Dengan demikian, hambatan non-tarif bukan hanya dilihat sebagai penghalang, tetapi juga sebagai pemicu bagi UMKM untuk bertransformasi. Jika UMKM mampu beradaptasi, meningkatkan kualitas produk, dan memanfaatkan dukungan kebijakan pemerintah, maka hambatan non-tarif dapat menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing serta memperluas akses pasar internasional.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hambatan non-tarif menjadi salah satu faktor utama yang membatasi kontribusi UMKM Indonesia dalam ekspor produk ke pasar internasional. Hambatan ini meliputi standar kesehatan dan keamanan pangan, regulasi teknis mengenai kemasan dan label, kuota impor, prosedur administratif yang kompleks, serta kebijakan lingkungan yang semakin ketat. Hambatan-hambatan tersebut secara langsung meningkatkan biaya produksi, memperlambat waktu ekspor, mengurangi daya saing produk, dan membatasi akses UMKM ke pasar global.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga dalam menghadapi hambatan non-tarif, baik dari sisi kapasitas sumber daya, kesiapan sertifikasi internasional, maupun dukungan kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, hambatan non-tarif juga dapat menjadi pendorong bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi digital agar mampu memenuhi standar global. Dengan strategi yang tepat, UMKM berpotensi memperkuat posisi mereka di pasar internasional dan meningkatkan kontribusi terhadap devisa negara.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Dukungan Pemerintah: Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendukung UMKM dalam menghadapi hambatan non-tarif, misalnya dengan menyediakan subsidi sertifikasi internasional, mempermudah prosedur ekspor, serta melakukan diplomasi perdagangan untuk menegosiasikan standar yang lebih realistis bagi UMKM.
2. Peningkatan Kapasitas UMKM: Pelaku UMKM disarankan untuk meningkatkan kapasitas internal melalui pelatihan mengenai standar internasional, inovasi produk, penguatan *branding*, serta penerapan teknologi digital seperti *traceability* dan *blockchain* untuk memenuhi persyaratan pasar global.
3. Kolaborasi dan Kemitraan: Diperlukan kolaborasi antara UMKM, asosiasi bisnis, lembaga riset, dan sektor swasta untuk mempermudah akses informasi mengenai regulasi internasional, mendapatkan sertifikasi, serta memperluas jaringan pemasaran.
4. *Monitoring* dan Evaluasi: Disarankan agar pemerintah dan asosiasi UMKM melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap hambatan non-tarif yang muncul, agar strategi dukungan dapat diperbarui sesuai perkembangan regulasi global.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, UMKM Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan memperluas akses ke pasar internasional, sehingga peran sektor ini dalam perekonomian nasional menjadi lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Adolf, H. (2017). *Hukum Perdagangan Internasional*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ariyani, D., & Pramudito, A. (2021). Analisis biaya logistik ekspor Indonesia dan dampaknya terhadap daya saing UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(2), 123–139.
- Aswicahyono, H., & Hill, H. (2001). The ASEAN Free Trade Agreement: Impact on trade flows and external trade. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37(2), 145–168.
- Bell, J., McNaughton, R., Young, S., & Crick, D. (2003). Towards an integrative model of small firm internationalisation. *Journal of International Entrepreneurship*, 1(4), 339–362.

- Chandrarin, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi - Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, L. (2022). Implementasi Trade Facilitation Agreement (TFA) sebagai reformasi perekonomian di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 402–415.
- Nugroho, Y. (2020). Strategi meningkatkan daya saing UMKM Indonesia dalam menghadapi hambatan non-tarif. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 1(1), 45–60.
- OECD. (2021). *Trade and the Environment: Policy Coherence and the Role of Standards*. OECD Publishing.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (8th ed.). John Wiley & Sons.
- Sgrignoli, P., Metulini, R., Zhu, Z., & Riccaboni, M. (2017). The indirect effects of FDI on trade: A network perspective. *Scientific Reports*, 7, 46799. <https://doi.org/10.1038/srep46799>
- Sugianto, D. (2023). Indonesia's state policy in resolving international trade barriers. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(7), 845–856.
- Tambunan, T. (2019). *UMKM dan Ekonomi Global: Tantangan dan Peluang*. Penerbit Salemba Empat.
- UNCTAD. (2020). *World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic*. United Nations Conference on Trade and Development.
- WTO. (2022). *World Trade Report 2022: Trade and the Economy*. World Trade Organization.